

INDONESIA KITA (I)

Oleh Nurcholish Madjid

Sekalipun Islam merupakan agama bagi golongan terbesar penduduk Indonesia, namun para tokoh pendiri bangsa tidak merujuk kepada sumber-sumber ajaran dan sejarah Islam untuk wawasan mereka tentang “negara-bangsa”. Beberapa tokoh pelopor pertama nasionalisme modern seperti Haji Omar Said Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim, dengan bekal perlengkapan metodologi yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah Belanda, menunjukkan kemampuan cukup besar untuk memahami esensi komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Tetapi selain mengalami kesulitan dalam usaha menyatakan pokok-pokok pikiran Madinah itu dalam kerangka cara pandang modern dengan idiom-idiom dan jargon-jargonnya sendiri yang relevan, Tjokro dan Salim juga menghadapi kenyataan bahwa tidak ada satu pun negara dalam lingkungan “dunia Islam” yang merupakan wujud kontemporer komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Yang ada ialah justru model-model kekuasaan totaliter, despotik dan zalim, baik yang kerajaan maupun yang secara formal merupakan negara republik. Maka dalam hal “*modern national community building*”, para tokoh Indonesia tidak melihat contohnya dari yang ada di lingkungan “dunia Islam”, tetapi justru dari yang ada di lingkungan “dunia Barat”. Pendidikan modern telah membantu mereka memahami konsep-konsep nasionalisme modern, yang berlawanan dengan konsep-konsep kekuasaan para raja feodal yang selama ini mereka kenal.

Tentang Sistem Presidensial

Para tokoh pendiri negara itu merupakan komunitas intelektual modern Indonesia angkatan pertama, dan akses mereka kepada dunia pemikiran modern telah dengan kuat sekali mewarnai gagasan-gagasan mereka tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan, serta tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan. Kutipan-kutipan dari karya-karya para pemikir Barat bertaburan dalam tulisan-tulisan para tokoh itu. Pikiran-pikiran politik John Locke, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Montesquieu, Rousseau, Rénan, dan lain-lain, juga ideologi-ideologi Karl Marx, Friesdrich Engels, Lenin, Sun Yat Sen, sangat mempengaruhi pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Mereka itu tidak berasal hanya dari kalangan yang secara salah kaprah disebut “nasionalisme sekular” seperti Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Syahrir, tetapi juga dari kalangan yang disebut “nasionalis Islam” seperti Haji Omar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Muhammad Natsir. Titik-temu mereka semua ialah aspirasi demokrasi modern. Mereka menguasai bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman — selain bahasa Belanda — sehingga wawasan mereka menjadi lebih kaya dan luas dengan bahan-bahan dari berbagai sumber.

Disebabkan oleh beberapa segi perkembangannya, Amerika Serikat dengan Presiden Franklin Delano Roosevelt selaku tokoh utamanya saat itu, harus diakui telah menjadi rujukan utama dibanding dengan negara-negara lain. Roosevelt, yang oleh majalah-majalah internasional edisi millenium yang lalu dipandang sebagai pribadi paling berpengaruh selama abad yang lalu (disusul oleh Mahatma Gandhi dan lain-lain), adalah seorang anti imperialisme dan kolonialisme. Ia mempunyai cita-cita membangun kembali dunia yang bebas dari penjajahan, setelah Perang Dunia II. Roosevelt adalah tokoh terpenting di balik konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, 1994. Dalam konferensi Bretton Woods itu diputuskan untuk mendirikan badan

“Dana Moneter Internasional” (IMF) dan Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Pengembangan (IBRD, *International Bank for Reconstruction and Development*, yang lebih dikenal sebagai “Bank Dunia”). Lepas dari kinerja nyata kedua badan keuangan internasional itu yang akhir-akhir ini menjadi sasaran kecaman pedas berbagai kalangan, Roosevelt harus diingat sebagai tokoh yang bermaksud menggunakannya untuk tujuan-tujuan politik global yang lebih mulia, yaitu membangun kembali dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme, setelah Perang Dunia II. Seandainya sempat dilaksanakan, pembangunan kembali dunia itu akan sama dengan model *Marshall Plan*, 1947, untuk Eropa, “*A highly successful program of U.S. economic and technical assistance to 16 European countries, to permit them to restore their productive capacity after the disruption of World War II.*” Tetapi Roosevelt tidak sempat melaksanakan niatnya, karena ia meninggal mendadak pada awal jabatan kepresidenannya yang keempat (12 April 1945), dan digantikan oleh wakilnya, Harry S. Truman.

Sedikit cuplikan sejarah mutakhir Amerika itu cukup penting dikemukakan, karena berpengaruh besar sekali kepada pertumbuhan awal negara Indonesia. Presiden Truman adalah penguasa Amerika yang memutuskan untuk membuat bom atom dengan proyek penelitian super rahasia, “*Manhattan Project*” di Universitas Chicago dipimpin oleh Enrico Fermi. Setelah berhasil dibuat, bom itu ia perintahkan untuk dijatuhkan di atas dua kota industri Jepang padat penduduk, Hiroshima dan Nagasaki. Tindakan itu dicatat dalam sejarah kemanusiaan sebagai tragedi yang sampai sekarang belum ada tolak bandingannya, suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tiada taranya. Banyak orang bespekulasi, kekejaman itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi apa pun penilaian orang, kenyataan ironis telah terjadi, yaitu bahwa peristiwa jatuhnya bom atom atas dua kota di Jepang itu telah membuka peluang untuk diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, puncak perjuangan bangsa yang telah lama dinanti-nanti.

Truman juga meninggalkan masalah yang ikut menyulitkan Indonesia. Menurut banyak kalangan, ia dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya eskalasi perang dingin antara “Barat” dan “Timur” sesudah Perang Dunia II. Dalam hal ini pun banyak orang berpendapat, seandainya saat itu Roosevelt masih hidup, mungkin perang dingin tidak akan separah akibat kebijakan Truman. Walaupun begitu, sisa-sisa kebijakan Roosevelt banyak yang bertahan. Amerika, bersama dengan Australia (pemerintahan Partai Buruh), tergolong negara-negara Barat yang banyak membantu kemerdekaan Indonesia. Ketika pada 10 November 1945 kota Surabaya dibombardir oleh tentara Inggris dan Belanda, Amerika dan Australia adalah dua negara Barat yang aktif menghalangi atau meleraikan.

Karena penampilan dan komitmen Roosevelt yang mengesankan, beberapa tokoh pendiri negara Indonesia cukup banyak mendapat ilham dari pengalaman Amerika saat itu dalam hal negara dan seni kenegaraan (*state and statecraft*). Selain memilih bentuk republik, para tokoh Indonesia juga menyadari perlunya dirumuskan dengan jelas nilai-nilai asasi kenegaraan dalam dokumen utama negara. Nilai-nilai asasi itu mereka rumuskan menjadi dasar-dasar negara yang kemudian disebut Pancasila, yang tertuangkan dalam dokumen primer Republik Indonesia, suatu dokumen yang dirancang sebagai naskah Deklarasi Kemerdekaan. Meskipun akhirnya, karena beberapa sebab, tidak digunakan sesuai rencana semula — dan Deklarasi Kemerdekaan diganti dengan Proklamasi Kemerdekaan yang naskahnya ditulis Bung Karno secara tergesa-gesa — namun semangat dokumen primer itu dipertahankan dan kini menjadi Mukadimah Undang-Undang Dasar. Dengan mencontoh Amerika, para pendiri negara juga merancang pelaksanaan demokrasi dengan pemerintahan presidensial periodik. Mereka juga menganut prinsip pluralisme, dan berpegang kepada asas kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Keseluruhan wawasan itu juga telah menjadi semangat umum setiap UUD yang pernah dimiliki Republik sepanjang sejarahnya sampai sekarang,

seperti UUD RIS dan UUDS, selain UUD 1945 sendiri, yang sekarang ini berlaku.

Tentang Sistem Parlemerter

Dengan adanya Proklamasi, suatu deretan eksperimen melaksanakan pikiran-pikiran kenegaraan para *founding fathers* itu dimulai. Tetapi segera ternyata bahwa mereka membentur tembok logika diplomasi internasional pasca Perang Dingin II. Indonesia adalah “milik” pihak yang kalah, yaitu Jepang, karena itu harus diserahkan kembali kepada pihak pemenang, yaitu Sekutu, sebagai “harta rampasan perang”. Percobaan melaksanakan pikiran-pikiran kenegaraan “revolusioner” itu berlangsung hanya tiga bulan, untuk kemudian diganti, secara terpaksa, dengan sistem lain yang oleh Bung Karno sangat tidak disukai, yaitu demokrasi parlemerter model Eropa Barat, dengan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden simbolik, tanpa kekuasaan, dan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri, pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dalam salah satu tulisannya sebelum kemerdekaan, Bung Karno mengecam habis sistem parlemerter sebagai sistem yang menguntungkan golongan berduit dari kalangan kaum borjuis dan menindas rakyat.

Tujuan penggantian sistem presidensial menjadi sistem parlemerter itu memang telah menghasilkan suatu terobosan diplomatik. Didahului oleh perundingan Roem-Royen yang menghasilkan Konferensi Meja Bundar untuk penyerahan/pengakuan resmi kedaulatan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda, akhirnya, pada 27 Desember 1949, kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan resmi internasional. Namun begitu, penerapan sistem parlemerter telah menimbulkan berbagai masalah nasional, yang bersumber dari ketidakstabilan negara dan pemerintahan yang silih berganti dalam jangka waktu pendek. Sebegitu jauh, penampilan terbaik “demokrasi liberal” parlemerter itu adalah pada saat

pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, seorang tokoh Masyumi pengikut Mohammad Natsir, yang pada tahun 1955 berhasil melaksanakan pemilihan umum pertama dalam sejarah Republik Indonesia, suatu pemilihan umum yang sangat sukses. Di luar itu, sistem parlementer lebih banyak menyulitkan bangsa dan negara.

Tentang Demokrasi Terpimpin

Keadaan serba tidak menentu itu mendorong Bung Karno, Presiden (konstitusional) saat itu, untuk mengumumkan dekrit kembali ke UUD '45, pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu disusul dengan Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959 berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita”, populer dengan terjemah Inggrisnya, “*Rediscovery of Our Revolution*”. Bagi Bung Karno, yang dimaksudkan “menemukan kembali revolusi kita” dapat diringkaskan berupa pemerintahan yang kembali ke sistem presidensial dari sistem parlementer. Sejak itu Presiden, dalam hal ini Bung Karno, bukan lagi sekadar lambang negara, melainkan kepala pemerintahan. Sistem presidensial diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat, stabil dan berwibawa. Dengan begitu pembangunan nasional dapat dijalankan dengan mantap, seperti halnya Amerika yang berhasil menjadi negara industri modern pertama di dunia, berkat kestabilan sistem presidensial.

Tetapi Bung Karno agaknya menyalahpahami dan mencampurkan pengertian “pemerintahan yang kuat” dengan “kepemimpinan yang kuat”. “Pemerintahan” lebih mengacu kepada sistem, sedangkan “kepemimpinan” mengacu kepada perorangan. Karena pandangannya itu, Bung Karno mengubah sistem presidensial periodik lima tahunan menjadi sistem kepresidenan seumur hidup. Kemudian Bung Karno tidak lagi memandang dirinya cukup sebagai kepala pemerintahan atau ketua badan eksekutif negara, melainkan sebagai “pemimpin besar revolusi”. Pemerintahan

presidensial periodik yang seharusnya dilaksanakan dengan mencontoh dan mengembangkan sistem serupa yang sudah mapan di dunia, ia ubah menjadi “demokrasi terpimpin”. Beberapa partai politik yang dipersatukan oleh *platform* demokrasi modern, yaitu Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Parkindo dan Partai Katolik, didukung beberapa pribadi tokoh kalangan NU dan PNI, dan dengan restu Bung Hatta, membentuk gerakan “Liga Demokrasi” guna menggalang kekuatan politik untuk mencegah dan menghalangi Bung Karno meluncur ke lembah kediktatoran. Sebab rakyat mulai merasa kehilangan kebebasan sipilnya dan ekonomi merosot sampai hampir membangkrutkan Negara. Politik *grandiose* Bung Karno dengan, misalnya, ambisinya hendak mengganti PBB, Olimpiade, dan lain-lain, ikut memperburuk keadaan ekonomi bangsa hingga terasa tidak tertahankan lagi oleh rakyat. Dalam keadaan seperti itulah Bung Karno pada tahun 1965 jatuh *in disgrace* — lepas dari persoalan siapa sebenarnya yang berperan dalam proses penjatuhan itu, adil ataupun tidak adil. Sistemnya yang kemudian disebut “Orde Lama” harus memberi jalan kepada sistem lain yang disebut “Orde Baru”.

Jatuhnya Bung Karno *in disgrace* banyak diratapi tidak saja oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, khususnya “Dunia Ketiga”. Sebab Bung Karno adalah bapak sebenarnya Republik Indonesia merdeka, dan pejuang besar untuk membebaskan bangsa-bangsa terjajah. Namun tanpa sedikit pun mengurangi penghargaan kepada putra terbesar bangsa Indonesia itu, kita harus menarik pelajaran dari kelemahan manusiawi Bung Karno untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kepada Allah *swt* kita panjatkan sebaik-baik harapan dan doa untuk Bung Karno, bapak kita semua. [❖]